

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Azwar, Saifuddin, 2004, *Metode Penelitian Cetakan V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fajri E. Z. dan Ratu Aprilia Senja, 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher.

Friedman, L. M., 1984, *American Law*, W.W. Norton and Company.

Panayi, Christiana HJI, 2016, *Current Trends on Automatic Exchange of Information*, Queen Mary University of London.

Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan, 2005, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, Raja Grafindo Pers, Jakarta.

Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soemitro, R. H., 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soemitro, Rochmat, 1997, *Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya*, Eresco, Bandung.

Soemitro, Rochmat, 2008, *hukum pajak internasional Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung.

b. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Artha, M.D. 2018, *Analisis Yuridis Potensi Dampak Berlakunya Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Terhadap Industri Perbankan di Kabupaten Sleman*, Skripsi, S1 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Maitsa, F.S., 2018, *Analisis terhadap Prinsip Kerahasiaan Bank dan Self Assessment System Dikaitkan dengan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan*, Skripsi, S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univesitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Samsul, Hidayat, 2017, *Kesiapan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dalam Mengadopsi Automatic Exchange of Information*, Skripsi, S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univesitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Septiani, I.A., 2017, *Penerapan Sistem Pertukaran Informasi Otomatis (Automatic Exchange of Information) di Indonesia dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat terkait Keterbukaan*

Rahasia Data dan Informasi di Bidang Perpajakan dan Perbankan, Skripsi, S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

c. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 67/PJ/2009 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Peraturan Jenderal Pajak No. PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis.

Peraturan Menteri Keuangan No. 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 281).

Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK..03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK..03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas PMK-217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).

Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

d. Internet

CITA (Center for Indonesia Taxation Analysis), “Exchange of Information: Peluang dan Tantangan”, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/02/Exchange-of-Information-Peluang-dan-Tantangan.pdf>, diakses tanggal 21 Agustus 2020.

detikFinance,”Batas Rekening Diintip Pajak Jadi 1 M Bakal Kurangi Kepanikan”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d->

[3524005/batas-rekening-diintip-pajak-jadi-rp-1-m-bakal-](#)

[kurangi-kepanikan](#), diakses tanggal 10 Januari 2021.

Direktorat Jenderal Pajak, “Exchange of Information (EoI)”,
<https://www.pajak.go.id/id/laman-exchange-information>, diakses
tanggal 21` Agustus 2020

Direktorat Jenderal Pajak, “Sekilas tentang DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK”, [http://edukasi.pajak.go.id/tentang-pajak/siapakah-
Direktorat Jenderal Pajak/69-tentang-Direktorat Jenderal
Pajak.html](http://edukasi.pajak.go.id/tentang-pajak/siapakah-Direktorat-Jenderal-Pajak/69-tentang-Direktorat-Jenderal-Pajak.html), diakses tanggal 21 Agustus 2020.

Direktorat Jenderal Pajak, [https://www.pajak.go.id/id/alamat-
kantor/direktorat-data-dan-informasi-perpajakan](https://www.pajak.go.id/id/alamat-kantor/direktorat-data-dan-informasi-perpajakan), diakses tanggal
26 Agustus 2020.

Fiki Ariyanti, “Dalam 10 Tahun, RI Cuma 2 Kali Capai Target
Penerimaan Pajak”,
[https://www.liputan6.com/bisnis/read/603802/dalam-10-tahun-ri-
cuma-2-kali-capai-target-penerimaan-pajak](https://www.liputan6.com/bisnis/read/603802/dalam-10-tahun-ri-cuma-2-kali-capai-target-penerimaan-pajak), diakses tanggal 21
Agustus 2020.

G20, “About the G20”, <https://www.g20.org/about-the-g20.html>, diakses
tanggal 5 Maret 2021.

Hendra Kusuma, “Batas Rekening Diintip Pajak Jadi 1 M Bakal Kurangi
Kepanikan”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d->

3524005/batas-rekening-diintip-pajak-jadi-rp-1-m-bakal-kurangi-kepanikan, diakses tanggal 10 Januari 2021.

jitunews, "Dampak Buruk Perppu No 1 Tahun 2017 Bagi Nasabah Bank dan Masyarakat", <https://www.jitunews.com/read/60425/dampak-buruk-perppu-no-1-tahun-2017-bagi-nasabah-bank-dan-masyarakat>, diakses tanggal 5 Maret 2021.

Kantor Staf Presiden, "Menyongsong Automatic Exchange of Information (AEOI)", <https://ksp.go.id/menyongsong-automatic-exchange-of-information-aeoi/>, diakses tanggal 22 Agustus 2020.

Kompas, "Babak Belur APBN 2020: Penerimaan Pajak Anjlok, Pengeluaran Meroket", <https://money.kompas.com/read/2020/12/26/163815526/babak-belur-apbn-2020-penerimaan-pajak-anjlok-pengeluaran-meroket?page=all>, diakses tanggal 5 Maret 2021.

LDP, "Mengenal Akses Informasi Keuangan (ASIK) di Direktorat Jenderal Pajak", <https://accounting.binus.ac.id/2019/12/18/mengenal-akses-informasi-keuangan-asik-di-direktorat-jenderal-pajak/>, diakses tanggal 7 April 2021.

Nanang Zainal Arifin, "BEPS Dalam Kerangka Kerja Sama G20 Dan Implementasinya Kepada Indonesia", <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/beps%20dalam%20>

*0kerangka%20kerja%20sama%20g20%20dan%20implementasin
ya%20kepada%20indonesia.pdf*, diakses tanggal 5 Maret 2021.

Riska Marlinda Darmanti dan Darmawan Mangkan, “*The Implementation of Automatic Exchange of Information As A Tool to Tackle Offshore Tax Evasion: An Experience From Indonesia*”, <https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/view/61/20>, diakses tanggal 16 April 2021.

e. Jurnal

Akmam, Sidharta “Pertukaran Otomatis dalam Informasi: Perspektif Ekonomi Politik”, *Jurnal Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas Airlangga*, Volume X No. 2, Surabaya, 2017.

Cavelti, Luzius U., “*Automatic Information Exchange versus the Withholding Tax Regime Globalization and Increasing Sovereignty Conflicts in International Taxation*”, *Jurnal World Tax*, Juni 2013.

Manan, Bagir, “Ketentuan-Ketentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dalam Pembangunan Hukum Nasional”, *Makalah dalam Pertemuan Ilmiah tentang Kedudukan Biro-Biro Hukum/Unit Kerja Departemen/ LPND dalam Pembangunan Hukum*, Jakarta, 19-20 Oktober 1994.

Rusli, Hardijan, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V, No. 3, Tangerang, 2006.

f. Koran

Hidayatullah, M. S., “Urgensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Informasi Pajak”, *Kompas*, 18 Mei 2017.

Raharjo, Sajtipto, “Berhukum Dalam Keadaan Luar Biasa”, *Kompas*, 19 November 2009.

g. Hasil wawancara

Wawancara dengan Faradina Naviah selaku Pegawai Pelaksana Direktorat Perpajakan Internasional pada Seksi Pertukaran dengan Negara Mitra.